

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu keluarga miskin yang rentan dan telah tercatat dalam Basis Data Terpadu. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada individu maupun keluarga miskin guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. yang rentan terhadap permasalahan sosial. penanganan fakir miskin, Persoalan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang telah ada sejak lama dan Biasanya terjadi di sebagian besar negara berkembang, khususnya di negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Indonesia¹.

Kemiskinan dapat diartikan dalam berbagai cara, dan sebagian besar umumnya menghubungkannya dengan dimensi ekonomi. Berbagai usaha untuk merumuskan makna kemiskinan dan mengenali fenomena ini sebenarnya menciptakan suatu gagasan yang dapat disederhanakan. Pertama, melalui penyebabnya, kemiskinan bisa dikelompokkan kedalam kemiskinan alamiah dan struktural. dan kedua melalui pengukuran, perbedaan kemiskinan juga dibagi kedalam dua bentuk yaitu relatif dan absolut².

¹ Dr.ZulkaniEffendi,M.Si dkk, 2023, Implementasi Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Dinas Soial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 di Kecamatan Ilir Barat II),Jurnal Ilmia Adimitrasi Sosial.

² Nurwati, N. Kemiskinan: “Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran”, 10(1), 2008, hlm 3.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya pendapatan dan upah, serta akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan jasa, lokasi geografis, perbedaan jenis kelamin, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Semua faktor ini saling terkait dan seringkali memperburuk situasi kemiskinan, menciptakan siklus yang sulit untuk diputuskan.³

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 28,01 juta orang pada tahun 2016, lalu mengalami penurunan menjadi 27,77 juta orang pada tahun 2017, dan 25,95 juta orang pada tahun 2018. Namun, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 26,42 juta orang pada tahun 2020, dan pada Maret 2022 tercatat sebanyak 26,16 juta orang. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir. Jika dilihat dari data diatas angka kemiskinan di Indonesia bersifat dinamis yang artinya masih sangat mungkin dapat terus meningkat.⁴

Sistem perlindungan sosial, yang meliputi jaminan sosial dan bantuan sosial, merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Perlindungan sosial berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanannya di negara berkembang. Terdapat tiga fungsi utama dari perlindungan sosial, yaitu: 1) membantu menjaga konsumsi dasar bagi mereka yang miskin atau berisiko jatuh miskin, 2) mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan

³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015).

⁴ <https://data.tempo.co/data/1493/jumlah-penduduk-miskin-dan-tingkat-kemiskinan-maret-2022-menurun> (Diakses, 28 Januari 2023).

aset produktif, dan 3) memberikan kesempatan bagi individu yang miskin untuk menghasilkan pendapatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.⁵

Bantuan tunai bersyarat, atau yang dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT), merupakan skema perlindungan sosial yang memberikan uang tunai kepada keluarga miskin sebagai kompensasi atas kepatuhan terhadap perilaku tertentu yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, skema ini dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengikuti imunisasi, atau memenuhi persyaratan kesehatan lainnya.⁶

⁵ Yolandika Arsyad,dkk,2022, Yolandika Arsyad,dkk,2022,Implementasi Pendekatan Hak Dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo, Jurnal Perkerja Sosial.

⁶ Yolandika Arsyad,dkk,2022, Yolandika Arsyad,dkk,2022,Implementasi Pendekatan Hak Dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo, Jurnal Perkerja Sosial

Kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesia, termasuk di provinsi Jambi khususnya Kota Jambi .

Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Tahun 2017-2021.

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribuan Jiwa)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jambi	286.55	281.69	274.32	277.80	293.86	279.37
Kerinci	17.62	16.79	17.00	17.48	18.45	18.20
Merangin	35.48	33.95	32.88	33.92	35.44	34.14
Sarolangun	25.61	25.70	25.39	25.79	27.06	26.23
Batanghari	27.49	27.55	26.53	26.54	27.24	26.24
Muaro Jambi	18.28	17.38	16.86	17.30	20.49	20.64
Tanjung Jabung Timur	27.22	26.99	25.35	24.23	24.42	23.42
Tanjung Jabung Barat	36.33	36.28	35.12	34.78	36.10	33.95
Tebo	23.18	22.86	22.83	22.47	23.77	22.81
Bungo	20.81	21.11	20.87	22.07	23.64	20.69
Kota Jambi	52.08	50.61	48.95	50.44	54.23	50.40
Kota Sungai Penuh	2.46	2.48	2.55	2.78	3.03	2.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jambi menunjukkan tren penurunan dari 2017 hingga 2019. Namun, angka kemiskinan meningkat lagi

pada periode 2020 hingga 2021, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada 2022. Ini berarti bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, tantangan masih ada, dan faktor-faktor tertentu seperti dampak pandemi atau kondisi ekonomi dapat memengaruhi fluktuasi tingkat kemiskinan di daerah tingkat kemiskinan di Kota Jambi bersifat dinamis .

Selanjutnya data kemiskinan berdasarka penerima program keluarga harapan (PKH) di tingkat kecamatan jambi timur Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi pada tahun 2023.

Tabel 1.2. Jumlah Kemiskian Berdasarkan Data Penerima Program PKH di
Kelurahan Tanjung Pinang Jambi Timur Kota Jambi 2023.

NAMA_ WILAYAH PENERIMA PKH TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 2023.			
1.Alam Barajo	Total : 985	2.Danau Sipin	Total : 13741
Bagan Pete	200	Legok	588
Beliung	55	Murni	172
Kenali Besar	338	Selamat	115
Mayang Mangurai	133	Solok Sipin	321
Rawa Sari	257	Sungai Putri	176
Simpang Rimbo	2	(blank)	1
3.Kota Baru	Total :1297	4.Paal Merah	Total: 1517
Kenali Asam	9	Bakung Jaya	3
Kenali Asam Atas	182	Eka Jaya	332
Kenali Asam Bawah	411	Lingkar Selatan	330
Paal Lima	200	Paal Merah	201

Simpang III Sipin	288	Payo Selincih	334
Suka Karya	192	Talang Bakung	317
Talang Gulo	14		
(blank)	1		
5.Danau Teluk	Total : 615	6.Pasar Jambi	Total : 344
Olak Kemang	222	Beringin	163
Pasir Panjang	77	Orang Kayo Hitam	38
Tanjung Pasir	88	Pasar Jambi	10
TanjungRaden	121	Sungai Asam	132
Ulu Gedong	105	(blank)	1
(blank)	2		
7.Jelutung	Total : 1431	8.Pelayangan	Total : 537
Cempaka Putih	202	Arab Melayu	135
Handil Jaya	72	Jelmu	26
Jelutung	399	Mudung Laut	85
Kebun Handil	173	Tahtul Yaman	160
Lebak Bandung	270	Tanjung Johor	105
Payo Lebar	274	Tengah	26
Talang Jauh	41		
9.Jambi Timur	Total : 2084	Tanjung Sari	303
Budiman	116	Talang Banjar	341
Kasang	202	Tanjung Pinang	TOTAL : 370
Kasang Jaya	251		
Rajawali	198		
Sijenjang	178		

Sulanjana 125			
10.Jambi Selatan Total : 976		11.Telanaipura Total : 1017	
Pakuan Baru	107	Aur Kenali	7
Pasir Putih	255	Buluran Kenali	192
Tambak Sari	246	Pematang Sulur	119
Thehok	225	Penyengat Rendah	386
Wijaya Pura	142	Simpang IV Sipin	180
(blank)		Telanaipura	68
		Teluk Kenali	65
Grand Total keseluruhan :		12178	

Sumber: Dinas Sosial 16 oktober 2023 Gedung Pkh Kota Jambi

Dilihat dari data keseluruhan kecamatan di kabupaten kota jambi kecamatan jambi timur menjadi peringkat pertama dari penerima program PKH. Dan secara keseluruhan kelurahan tanjung pinang jambi timur kota jambi menjadi urutan ke dua dengan jumlah penerima sebanyak 370 jiwa, Dari data penerima PKH pada tahun 2023 secara keseluruhan kecamatan jambi timur penerima program PKH sebanyak 2084 jiwa pada tahun 2023.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jambi diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Sosial Keluarga Nomor 20/3.4/KP.03/1 yang mengatur tentang pengangkatan pendamping PKH. Surat keputusan ini mengalami pembaruan setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan program. Kesejahteraan sosial memang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Pelaksanaan PKH di Kota

Jambi diimplementasikan oleh Dinas Sosial, yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengatur, memantau, dan mengevaluasi jalannya program untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

Kantor Dinas Sosial Kota Jambi terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 156, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. DINSOS merupakan salah satu instansi teknis di bawah Pemerintah Kota Jambi yang memiliki tanggung jawab dalam bidang sosial memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang sosial. Tugas utama Dinas Sosial meliputi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan masalah kemiskinan. Dinas Sosial juga berperan dalam mendukung Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bagian dari organisasi teknis pemerintah.⁷

Pendamping sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat. Peran pendamping mencakup menjembatani masyarakat dengan berbagai lembaga yang relevan untuk mendukung pengembangan mereka. Habibullah (2011) juga menyebutkan bahwa pendamping PKH bertindak sebagai mitra antara pemerintah dan masyarakat, yang membantu keduanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, Rahmawati & Kisworo (2017) menambahkan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengajar, serta

⁷ Direktorat Jaminan Sosial, 2013 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, hal 10.

memiliki kemampuan untuk mewakili masyarakat dengan keterampilan teknis yang dimilikinya.

Penting bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk melaksanakan program di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat. Namun, tugas ini sering kali menempatkan mereka dalam situasi dilematis, mengingat bahwa Program yang direncanakan atau sedang dilaksanakan di lapangan terkadang tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas yang ada di lapangan, pendamping harus mampu bertindak bijak dan sabar. Peran Pendamping tidak hanya membutuhkan keterampilan serba bisa, tetapi juga kemampuan untuk menjadi penyeimbang dan mendengarkan suara masyarakat, termasuk keluhan terkait masalah kemiskinan yang dihadapi keluarga penerima manfaat.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), adalah individu dengan atribut pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana Pendamping PKH berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, serta bagaimana sistem lingkungan tersebut dapat mempengaruhi masalah yang dihadapi dan pola hidup masyarakat. Pendamping tidak hanya berperan dalam pelaksanaan program, tetapi juga harus memahami konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat untuk dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸

⁸ Hanifah Fatwa Nadilla dkk, 2022, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat, Jurnal Pekerjaan Sosial.

Dengan mengadopsi perspektif masyarakat setempat, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dapat memahami berbagai sudut pandang untuk menganalisis masalah yang ada di komunitas. Hal ini akan membantu mereka mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di wilayah tersebut, baik yang berasal dari faktor internal keluarga maupun dari kondisi lingkungan sekitar⁹.

Berdasarkan penjabaran dari data yang sudah dijelaskan membuktikan bahwa kemiskinan bukan hanya ditingkat nasional tapi juga sampai tingkat paling bawah yaitu kelurahan hingga banyak program yang diberikan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan baik tingkat nasional maupun tingkat kelurahan seperti program keluarga harapan (PKH), tentu dari Program ini memiliki banyak peran untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dari pengurangan kemiskinan salah satu adalah peran dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai salah satu wadah untuk mengatasi kemiskinan di tingkat kelurahan. Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi, angka kemiskinan tercatat mencapai 2.418 jiwa pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat, serta mendukung mereka dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi keluarga.

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, dapat terpenuhi. Secara sosial, kesejahteraan masyarakat berarti bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dengan

⁹ Hanifah Fatwa Nadilla dkk, 2022, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengurangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat, Jurnal Pekerjaan Sosial.

cara yang menghormati martabat manusia, serta dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang ada. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial yang memadai.¹⁰

Sementara itu, kesejahteraan bidang ekonomi dikatakan sudah tercapai apabila pendapatan per kapita penduduk sudah tinggi, tidak ada ketimpangan pendapatan yang terlalu signifikan, kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹¹

Fungsi kesejahteraan masyarakat Merupakan upaya untuk secara bertahap memperbaiki kondisi kehidupan individu melalui pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan dan penciptaan sumber daya komunitas, serta penyediaan struktur institusional yang mendukung pelayanan yang terorganisir, dengan fokus pada pembangunan yang bertujuan untuk merubah kehidupan masyarakat.¹²

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur berdasarkan beberapa variabel, diantaranya adalah:¹³

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar Pada variabel ini, kesejahteraan masyarakat bisa dilihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu:
 - 1) Masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena adanya kegiatan pemberdayaan.

¹⁰.Ibid.,

¹¹ urratul A'yun Nailufarh, Kesejahteraan Ekonomi Rakyat: Diantara Harapan dan Realitas, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 28

¹² Ummu Salamah, Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Insan Akademia, 2012), hlm.9

¹³ Rohani Budi Prihatin., Mohammad Mulyadi dan Nur Soholikah Putri Suni, Bumdes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (Jakarta: Tim Kreatif Publica, 2018), hlm. 51

- 2) Masyarakat merasakan keadilan dari hasil pemerataan pembangunan.
 - 3) Masyarakat secara merata memperoleh kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Peningkatan kualitas hidup mencakup peningkatan pendapatan, akses Pendidikan yang lebih berkualitas, disertai dengan kepedulian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Pada variabel ini, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu:
- 1) Masyarakat mengalami perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh.
 - 2) Masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dan tidak ada ketimpangan pendapatan.
 - 3) Nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat semakin meningkat.
- c. Memperbesar cakupan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap berbagai pilihan sosial bagi individu maupun negara Pada variabel ini, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan aspek berikut ini:
- 1) Semakin banyak tersedia Infrastruktur ekonomi dan fasilitas pendukung yang menunjang kehidupan masyarakat.
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana sosial yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan di tingkat kecamatan Jambi Timur yang menjadi bagian dari Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi sebagai penerima tertinggi Program PKH dalam pengurangan kemiskinan ini karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut untuk melihat keberhasilan dari Tugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Karena itu penulis memilih Pendamping Program Keluarga

Harapan sebagai objek dari penelitian ini . Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang sama terkait dalam menganalisis: Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengurangan kemiskinan di kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Cholin Adelina Sianturi, Ilmu Pemerintahn Universitas Jambi 2023,yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, mengenai Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Studi Menunjukkan Pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sudah mampu memberikan peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh masyarakat penerima PKH, adanya peningkatan taraf hidup, pendidikan dan pendapatan masyarakat penerima PKH sudah terpenuhi karena menyebabkan masyarakat mengalami peningkatan kehidupan secara merata.

Efektivitas pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sudah tercapai, dimana dari indikator pencapaian tujuan sudah dapat dikatakan efektif karena program PKH ini dapat meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan¹⁴.

Perbedaan penelitan terdahulu dan sekarang penelitian ini berfokus kepada efektifitas pelaksaasn program PKH, di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi,

¹⁴ Cholin Adelina Sianturi,2023, Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, Universitas Jambi.

sedangkan penelitian ini berfokus kepada Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahul sama-sama berkaitan degan Program Keluarga Harapan dan meningkatkan keseajteran masarakat KPM, penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian terdahulu kedua Naomi Kartika Sari Butar Butar-Butar,2022,Yang berjudul mengenai Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan judul Program Keluarga Harapan: Pemenuhan Prinsip 3T pada Bantuan Sosial Beras Saat Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jambi Timu. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun penerapan prinsip 3T tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah—menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM, Program keluarga Harapan (PKH), selama masa pandemi, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurang efektifnya proses komunikasi dengan keluarga penerima manfaat PKH. Selain itu, data KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), tidak diperbarui secara berkala, sehingga keakuratan data menjadi rendah dan bantuan kerap tidak tepat sasaran. Di sisi lain, karena pendamping PKH harus menangani KPM di lebih dari satu kelurahan, mereka menghadapi tantangan dalam pengelolaan yang efisien. Terlebih lagi, pendamping yang masih kurang berpengalaman dari segi sumber daya manusia

(SDM) memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi mereka.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan yaitu perbedaan pada tempat penelitian di tingkat kecamatan sedangkan penelitian ini di tingkat kelurahan dan penelitian terdahulu fokus terhadap , Program Keluarga Harapan: Pemenuhan Prinsip 3T Pada Bantuan Sosial Beras Saat Masa Pandemi Covid-19, Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, di Kecamatan Jambi Timur sedangkan peneliti saat memfokuskan penelitiannya Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengurangan kemiskinan di kelurahan Tanjung Pinang ota Jambi . Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang kemiskiaan dan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif.

Adapun penelitian terdahulu yang kedua, Nadia dkk, Yang berjudul Strategi Dinas Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020, Ilmu pemerintahan universitas Jambi, di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, 2022, Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Skripsi ini bertujuan mengenai Program Keluarga Harapan merupakan bantuan di bidang sosial dari menteri sosial yang diberikan menyeluruh kepada masyarakat dengan mengikuti syarat sesuai dengan peraturan.

¹⁵ Riri Maria Fatriani ,Naomi Kartika Sari Butar Butar,2022, Program Keluarga Harapan: Pemenuhan Prinsip 3T Pada Bantuan Sosial Beras Saat Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jambi Timur, Jurnal Masyarakat Maritim (JMM).

Strategi yang diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Paal Merah menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan penurunan jumlah penerima bantuan yang cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, di lapangan masih terdapat masalah seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH, pencairan yang tidak tepat waktu, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program ini. Selain itu, tingkat kesejahteraan di Kecamatan Paal Merah belum bisa dikatakan tercapai, karena masih banyak warga yang belum menerima hak mereka, disebabkan oleh belum terpenuhinya standar kesejahteraan yang ditetapkan dalam tujuan PKH sesuai dengan peraturan Menteri Sosial.¹⁶

Berdasarkan Hasil penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini karena penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat kecamatan, sementara penelitian ini dilakukan di tingkat kelurahan. Penelitian sebelumnya berfokus pada strategi Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018–2022 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada Tugas pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat kelurahan. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berjudul Peran Dinas Sosial Kota Jambi dalam Penggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan

¹⁶ Nadia dkk, Yang berjudul Strategi Dinas Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020

(PKH) di Kecamatan Jelutung di Masa Pandemi Covid-19. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah program PKH di Kecamatan Jelutung telah berhasil mencapai tujuannya, yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹⁷

Penulis bermaksud menggunakan hasil penelitian sebelumnya untuk menganalisis data terkini mengenai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Jambi. Kelurahan Tanjung Pinang dipilih sebagai sampel penelitian karena merupakan kelurahan tingkat pertama di kecamatan yang dianggap representatif, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Akibatnya, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi, agar dapat mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dalam penelitian ini *peneliti sebagai penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

¹⁷ Dianti 2022 “Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Penggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Jelutung Dimasa Pandemi Covid-19

1. Bagaimana Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengulangan kemiskinan di kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi 2024 ?
2. Bagaimana upaya peningkatan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengulangan kemiskinan di kelurahan tanjung pinang kota Jambi 2024.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota jambi. nelitian ini yakni sebagai berikut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin peneliti peroleh yakni sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pemerintahan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi. Selain itu, temuan ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam dan wawasan mengenai penerapan, Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

1. kebijakan Publik

Menurut Browne dan Wildavsky, Kebijakan Publik merupakan proses pengembangan aktivitas yang saling beradaptasi dan menyesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, implementasi dapat dipahami sebagai penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan¹⁸.

Ini merupakan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, yang dihasilkan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat berbagai cara untuk melihat kebijakan publik, salah satunya adalah pendekatan masalah Edwards III mengembangkan pendekatan ini dengan mengajukan dua pertanyaan utama: (i) indikator-indikator apa yang mendukung keberhasilan kebijakan Publik dan (ii) indikator-indikator apa yang menghambat keberhasilan kebijakan Publik, menurut perspektif George C. Edward. Pendekatan

¹⁸ implementasi Program CVC (customs visit costomer) Kantor Pengawasan dan Pelayanan BEA Cukai Tipe Madya PAbean B Dumai, 2018 ,Muhammad Firdaus, M.Si , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau .

ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik¹⁹.

- a. Menurut George C. Edward, komunikasi merupakan komponen pertama yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, karena pembuat keputusan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan. Jika komunikasi berjalan dengan baik, para pemangku kepentingan akan lebih mudah memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan kepada pihak yang tepat, terutama kepada bagian personalia yang relevan. Kebijakan tersebut juga harus disampaikan dengan cara yang benar, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang efektif atau penyebaran informasi yang baik sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan dapat tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan tersebut. Ada tiga cara untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam konteks ini, yaitu:

- a. Selesai berpikir selama sepersekian detik

Pelaksanaan kebijakan yang efektif juga bergantung pada proses transmisi dan komunikasi yang lancar. Namun, komunikasi kerap mengalami kesalahpahaman karena melewati berbagai tingkatan birokrasi, sehingga pesan yang disampaikan sering terdistorsi di tengah perjalanan.

¹⁹ Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Yurensi Laary, 2022, Jurnal Administrasi Publik .

b. Para pelaksana kebijakan, yang juga dikenal sebagai birokrat lapangan, harus menerima komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Ada kalanya, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas untuk mengimplementasikan kebijakan, namun di sisi lain, hal ini bisa menyebabkan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan

c. Perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus bersifat konsisten dan jelas agar dapat diterapkan dengan baik. Hal ini penting karena jika perintah sering berubah-ubah, hal tersebut dapat membingungkan pelaksana di lapangan dan menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya merupakan faktor kedua yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini sangat penting dalam kebijakan Publik, dan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

a. Karyawan: Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah karyawan. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan staf untuk menjalankan kebijakan atau ketidaksesuaian kompetensi dalam bidangnya. Meningkatkan jumlah staf dan implementor tidak selalu cukup untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah staf yang memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan kebijakan atau menjalankan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

- b. Informas: Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik, diperlukan Informasi yang tepat datang dalam dua bentuk: pertama, informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, dan kedua, informasi mengenai data kepatuhan pelaksana yang harus terkait dengan proses dan hasil implementasi kebijakan tersebut. peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, Untuk pelaksanaan, otoritas biasanya harus bersifat formal. Kewenangan didefinisikan sebagai legitimasi atau otoritas yang diberikan kepada para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tersebut tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, yang dapat menggagalkan proses kebijakan Publik.
- d. Fasilitas Fisik: Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas fisik. Meskipun implementor mungkin memiliki jumlah karyawan yang memadai, kurangnya fasilitas yang diperlukan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, Meskipun staf sudah mencukupi, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, kebijakan Publik tetap tidak akan berhasil jika tidak ada fasilitas pendukung yang memadai.

3. Disposisi adalah faktor ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Sikap dan perilaku pelaksana kebijakan merupakan komponen penting dalam pendekatan kebijakan Publik. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya dengan tepat, tanpa adanya bias dalam praktiknya. Dalam hal ini, beberapa hal berikut harus dipertimbangkan untuk variabel disposisi:

a. Pengangkatan Birokrat: Disposisi atau sikap dari para pelaksana dapat menjadi hambatan signifikan dalam kebijakan Publik yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus melibatkan individu yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya mereka yang peduli terhadap kepentingan masyarakat.

b. Insentif Edward III menyatakan bahwa manipulasi insentif dapat menjadi Metode untuk mengendalikan kecenderungan pelaksana adalah dengan memberikan insentif yang memadai. Insentif sangat memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, karena pada umumnya, individu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, para pelaksana kebijakan dapat termotivasi untuk melaksanakan perintah dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. baik, demi memenuhi kepentingan organisasi atau pribadi mereka.

4. Struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Meskipun sumber daya yang diperlukan tersedia dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat diterapkan atau tercapai jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat dilaksanakan dengan efektif. Ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat proses implementasi kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Dua fitur yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi dan organisasi adalah:

- a. Standar Operasi Prosedur (SOP): SOP adalah prosedur baku yang memungkinkan pegawai, baik pelaksana kebijakan maupun administrasi birokrasi, untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara yang konsisten dan terorganisir di setiap tahap implementasi kebijakan. Harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan)
- b. Berusaha untuk membagi atau mendistribusikan tugas dan aktivitas pegawai di berbagai unit kerja.

Komunikasi adalah proses penyampaian kebijakan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, lembaga sosial masyarakat, dan LSM yang fokus pada masalah kebijakan. Proses komunikasi ini membantu para pelaku yang terlibat dalam struktur birokrasi untuk memahami inti dari kebijakan, termasuk apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan tersebut..

Dengan pemahaman yang baik tentang arti kebijakan, akan lebih mudah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari struktur birokrasi. Jika substansi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya (SOP) lebih jelas, disposisi para pelaksana kebijakan juga akan menjadi lebih terarah. Semakin jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah bagi pelaksana kebijakan untuk menerima, mengabaikan, atau menolak kebijakan tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi disposisi mereka dalam melaksanakan kebijakan.

Melalui proses komunikasi ini, kebutuhan akan sumber daya (resources) serta jumlah yang diperlukan menjadi lebih mudah untuk melaksanakan. Baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan. intensitas dan efektivitas komunikasi Kebijakan ini memerlukan kepemimpinan dari organisasi publik yang memiliki kapasitas dan tingkat profesionalisme tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama tahap implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur ini mencakup aspek-aspek seperti bentuk organisasi, distribusi wewenang, serta hubungan antar unit dalam dan luar organisasi yang terlibat dalam kebijakan Publik . Secara umum, struktur birokrasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur ini turut menentukan tingkat efektivitas dan intensitas komunikasi; semakin kompleks dan terpecah birokrasi, semakin besar pula kebutuhan koordinasi yang dapat memicu

terjadinya gangguan komunikasi jika komunikasi kebijakan terganggu, ada kemungkinan besar bahwa para pembuat kebijakan tidak mengetahui atau tidak memahami substansi kebijakan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, semakin jelasnya prosedur operasi standar (SOP), semakin mudah untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketika sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan ditetapkan dengan tepat, peluang keberhasilan akan lebih besar. Namun, jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi atau terbatas, kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan akan meningkat.

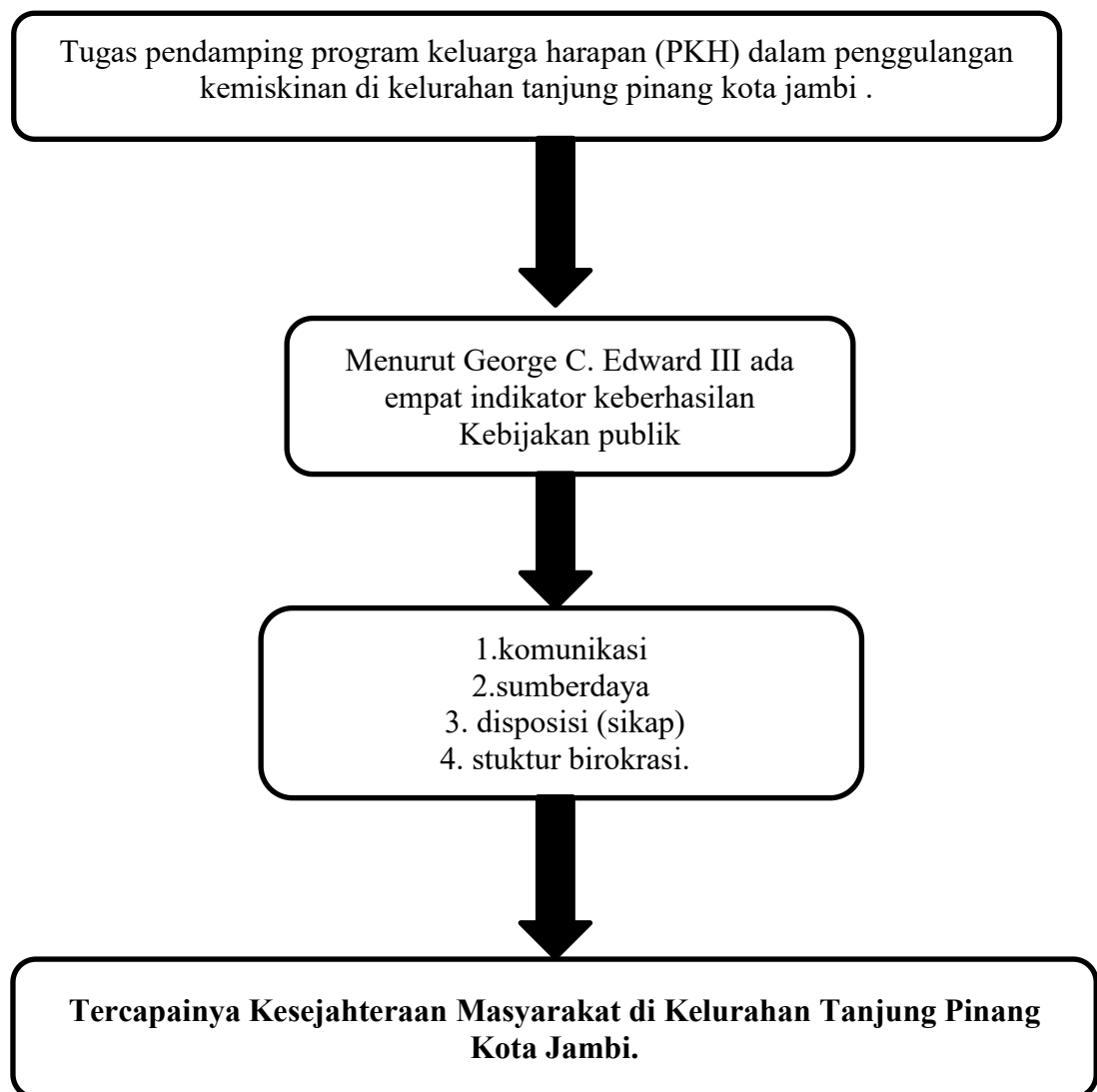
Struktur birokrasi juga berpengaruh terhadap disposisi para pelaku kebijakan. Semakin terpecah para pelaku kebijakan, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka. Hal ini akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis di antara mereka. Konflik dan ketidakharmonisan ini tentu saja dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih rentan gagal. SOP juga mempengaruhi sejauh mana para pelaku kebijakan bersemangat dalam melaksanakannya. Semakin jelas Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan, semakin mudah bagi para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan, termasuk tujuan, arah, kelompok sasaran, serta hasil yang diharapkan, baik bagi para pelaku kebijakan maupun organisasi mereka.

Kejelasan ini akan mempermudah seseorang dalam menentukan disposisi diri dan organisasinya untuk melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif. Jika manfaat dan keuntungan kebijakan sudah diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, disposisi mereka untuk melaksanakan kebijakan akan lebih tinggi. Disposisi yang tinggi ini akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.²⁰Oleh karena itu, keempat variabel tersebut harus diterapkan dan disediakan secara konsisten serta dengan rasa tanggung jawab yang tinggi agar pelaksanaan kebijakan publik dapat berhasil.

²⁰ Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Yurensi Laary, 2022, Jurnal Administrasi Publik .

1.6 Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan Teori²¹.

1.7.1 Jenis penelitian

Tipe penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwasanya metode Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengamati keadaan asli suatu fenomena, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Nazir menyatakan bahwa penelitian deskriptif berfokus pada keadaan manusia, peristiwa, sistem pemikiran, keadaan, obyek, dengan maksud demi menyusun deskripsi secara akurat, faktual dan sistematis berkenaan dengan fakta yang tengah diselidiki.

²¹ Buku Prof DR. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, 1 September, 2020. hal 2.

Nana Syaodih Sukmadinata, memaknai deskriptif kualitatif bertujuan demi menguraikan dan mencerminkan realitas yang terjadi, baik sifatnya alami ataupun rekayasa manusia, dengan penekanan pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan untuk melihat kesesuaian antara Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi ²², Dengan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, serta melibatkan aspek pengawasan yang terkandung dalam kebijakan ini, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari penelitian kualitatif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lingkup dalam Studi ini mengkaji pengaruh peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jambi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi. Kelurahan ini merupakan bagian dari Kecamatan Jambi Timur, dengan 2084 penerima bantuan PKH. sedangkan secara kelurahan tanjung pinang menjadi urutan pertama di Sembilan kelurahan yang ada di kecamatan Tanjung Pinang Kota Jambi penerima PKH 377, Jiwa pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya, Kelurahan Tanjung Pinang memiliki persentase rumah tangga miskin dan penduduk miskin yang lebih tinggi, di karenakan memiliki pembagian luas wilayah yang besar dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

²² Destiani Putri Utami, dkk., "Iklim Organisasi Kelurahan dalam Perspektif Ekologi,"Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 12, Mei 2021. hlm. 2738.

Penelitian kualitatif berfokus pada satu hal tertentu. Peneliti menggunakan fokus ini dalam merumuskan masalah penelitian untuk mencapai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat mempersempit cakupan penelitian, Kedua penetapan fokus membantu dalam menetapkan kriteria inklusi-eksklusi, yang merujuk pada kriteria untuk menentukan hal-hal yang termasuk atau tidak termasuk dalam penelitian²³. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah merujuk pada Tugas Pendamping Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi .

1.7.4 Sumber Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli. Data utama dalam penelitian ini berkaitan dengan Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di masyarakat di Tugas Pendamping PKH . Sumber data adalah Tugas Pendamping Program PKH Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data Data sekunder diperoleh dari dokumen, baik yang dianggap penting

²³ Ibid., hlm. 94

maupun yang tidak, seperti informasi mengenai peran,²⁴ SDM perpustakaan lainnya, serta prosedur pelaksanaan pendampingan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian diperoleh dari informan penelitian, yaitu individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel purposive diterapkan untuk memilih informan yang sesuai.

Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.3

Informan Penelitian di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi

NO	Narasumber	Jumlah
1	Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Jambi	1 Orang
2	Pendamping PKH Kelurahan Tanjung Pinang	1 Orang
3	Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	5 orang
JUMLAH		7 ORANG

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019, hlm. 132

Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data dari lapangan, teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting dalam penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengumpulkan data, mereka tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan menggunakan alat perekam untuk mencatat data, keterangan, atau informasi yang mungkin terlewat selama wawancara. Empat metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi wawancara, analisis dokumen, dan Triangulasi²⁵.

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, digunakan wawancara mendalam. Peneliti menerapkan metode wawancara mendalam, yaitu proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan. Dalam metode ini, pewawancara dan informan terjalin dalam hubungan sosial yang cukup lama sejak pemilihan informan dilakukan.

2. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui pencarian catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya dikenal sebagai metode dokumentasi. majalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan pencarian data di lapangan Data yang dapat ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, atau arsip. Untuk memberikan bukti langsung mengenai keadaan di lapangan terkait masalah masyarakat,

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012. Hlm. 40

peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian²⁶. Data yang diperoleh dari observasi atau wawancara dilengkapi dengan arsip dan data tambahan lainnya.

1.7.7 Analisis data

Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis, yang meliputi penulisan hasil, wawancara, rekaman, dan dokumentasi. Setelah itu, data diklasifikasikan, direduksi, dan disajikan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sejak peneliti mulai memasuki lapangan, sehingga analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data.

Pada garis besarnya, tahapan dalam analisis data ditempuh langkah-langkah;

- (1) Reduksi data, yang berarti membuat abstraksi atau rangkuman dari data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan.
- (2) Penyajian data, yang berarti menyajikan pokok-pokok informasi secara jelas dan dapat diandalkan, sehingga mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
- (3) Kesimpulan dan verifikasi, yang berarti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memverifikasi temuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya²⁷. Yaitu menarik kesimpulan sementara, yang memungkinkan verifikasi terus-menerus selama penelitian berlangsung. Tahapan ini dilakukan secara berulang sesuai dengan urutan langkah-langkah analisis, sehingga pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara bersamaan.

²⁶ Imamuddin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa): Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan", tahun 2018. Hlm. 87

²⁷ Ibid.

1.7.8 Keabsahan dan Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif, yang meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas. Teknik ini juga digunakan untuk membantah anggapan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dianggap Ilmiah ²⁸.

Triangulasi sumber data adalah proses untuk menguji kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti arsip, dokumen, hasil wawancara, hasil wawancara dengan beberapa subjek yang memiliki perspektif berbeda. Setiap metode ini menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang pada gilirannya memberikan perspektif atau intuisi yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, kita dapat memperluas pemahaman kita dan menemukan bukti yang lebih dapat diandalkan²⁹.

²⁸ Arnild Augina Mekarisce 2020, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 Edisi 3

²⁹ Reyvan Maulid Pradistya 2021, Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif. Vol 2 Series 10